



GUBERNUR SULAWESI BARAT

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT

NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PENGELUARAN KAS MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Dalam hal penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mengalami keterlambatan, Kepala Daerah melaksanakan pengeluaran setiap bulan paling tinggi sebesar seperduabelas setiap bulan jumlah pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran sebelumnya, dibatasi hanya untuk mendanai keperluan mendesak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa sehubungan dengan keterlambatan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat pada awal Tahun Anggaran 2025, diperlukan pengaturan tentang Pengeluaran Kas Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengeluaran Kas Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELUARAN KAS MENDAHULUI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Barat.
6. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
7. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

Pasal 2

Pengeluaran Kas Mendahului Penetapan APBD Tahun Anggaran 2025 hanya untuk keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak serta diprioritaskan untuk:

- a. Belanja yang bersifat mengikat; dan
- b. Belanja yang bersifat wajib.

Pasal 3

Belanja yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus-menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang berkenaan.

Pasal 4...



Pasal 4

Belanja yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain:

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Infrastruktur;
- d. Melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga;
- e. Kewajiban pembayaran Pokok Pinjaman;
- f. Bunga Pinjaman yang telah jatuh tempo; dan
- g. Kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 untuk mendanai pengeluaran kas direncanakan Rp1.645.550.162.534,00 (satu triliun enam ratus empat puluh lima miliar lima ratus lima puluh juta seratus enam puluh dua ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja tidak terduga; dan
- c. Belanja transfer.

Pasal 6

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a direncanakan sebesar Rp1.444.459.949.808,00 (satu triliun empat ratus empat puluh empat miliar empat ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus delapan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja hibah; dan
 - e. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp734.589.893.046,00 (tujuh ratus tiga puluh empat miliar lima ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu empat puluh enam rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp585.325.766.001,00 (lima ratus delapan puluh lima miliar tiga ratus dua puluh lima juta tujuh ratus enam puluh enam ribu satu rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp13.092.981.961,00 (tiga belas miliar sembilan puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh satu rupiah).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp110.788.808.800,00 (seratus sepuluh miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus delapan ribu delapan ratus rupiah).
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp662.500.000,00 (enam ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 7

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b direncanakan sebesar Rp835.246.979,00 (delapan ratus tiga puluh lima juta dua ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah).

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c direncanakan sebesar Rp200.254.965.747,00 (dua ratus miliar dua ratus lima puluh empat juta sembilan ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp200.254.965.747,00 (dua ratus miliar dua ratus lima puluh empat juta sembilan ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran pembiayaan daerah berupa pengeluaran pembiayaan untuk pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo pada Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp99.488.146.356,00 (sembilan puluh sembilan miliar empat ratus delapan puluh delapan juta seratus empat puluh enam ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah).
- (2) Jumlah anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kewajiban pembayaran utang yang jatuh tempo sebagaimana tercantum dalam perjanjian pinjaman.

Pasal 10

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.

Pasal 11...



Pasal 11

Uraian lebih lanjut Pengeluaran Kas Mendahului Penetapan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 4 Januari 2025
Pj. GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

BAHTIAR BAHARUDDIN

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal 4 Januari 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT,

ttd

AMUJIB

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2025 NOMOR 1

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum,



AFRISAL, SH, MH
Pangkat Penata Tk.I/III.d
NIP. 19811214 201101 1 006

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
NOMOR : 1 TAHUN 2025
TANGGAL : 4 JANUARI 2025
TENTANG : PENGELUARAN KAS MENDAHULUI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

RINGKASAN ANGGARAN BELANJA DAERAH YANG DIKLASIFIKASI MENURUT
KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	1.444.459.949.808,00
5.1.01	Belanja Pegawai	734.589.893.046,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	459.907.502.093,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	349.513.562.742,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	288.529.148.097,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	60.984.414.645,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	30.499.080.581,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	26.338.231.977,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	4.160.848.604,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	7.131.640.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	7.131.640.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	20.922.325.225,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	20.582.690.225,00
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	339.635.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	8.100.316.950,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	4.595.626.950,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	3.504.690.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	18.280.146.022,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	15.131.244.500,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	3.148.901.522,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	707.746.762,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	707.746.762,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	6.234.914,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	4.849.105,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1.385.809,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	21.785.486.544,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	19.848.522.803,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	1.936.963.741,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	746.898.920,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	615.610.785,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	131.288.135,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	2.214.063.433,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1.819.153.124,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	394.910.309,00
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	0,00
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	0,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	108.330.602.093,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	3.935.254.978,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	3.935.254.978,00



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	2.836.023.277,00
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	2.836.023.277,00
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	18.391.282,00
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	18.391.282,00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	101.540.932.556,00
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	101.540.932.556,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	142.099.150.380,00
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	10.185.412.670,00
5.1.01.03.01.0001	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor	2.870.000.671,00
5.1.01.03.01.0002	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	2.727.002.653,00
5.1.01.03.01.0003	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	1.994.635.188,00
5.1.01.03.01.0005	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Rokok	2.593.774.158,00
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	105.169.660.316,00
5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	105.169.660.316,00
5.1.01.03.04	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	2.202.384.020,00
5.1.01.03.04.0001	Belanja TKG PNSD	2.202.384.020,00
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	2.989.500.111,00
5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	2.989.500.111,00
5.1.01.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	5.003.711.280,00
5.1.01.03.06.0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	5.003.711.280,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	16.382.441.804,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	16.382.441.804,00
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	166.040.179,00
5.1.01.03.08.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	83.241.374,00
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	82.798.805,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	22.243.246.447,00
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	1.434.300.000,00
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	1.434.300.000,00
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	150.402.000,00
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	150.402.000,00
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	114.713.280,00
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	114.713.280,00
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	122.940.000,00
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	122.940.000,00
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	2.079.735.000,00
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	2.079.735.000,00
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	174.342.000,00
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	174.342.000,00
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	75.951.000,00
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	75.951.000,00
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	4.860.000.000,00
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif	4.860.000.000,00



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
	Pimpinan dan Anggota DPRD	
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	859.440.000,00
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	859.440.000,00
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	31.063.087,00
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	31.063.087,00
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	4.939.840.080,00
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	125.637.840,00
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	2.950.560,00
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	8.851.680,00
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	4.802.400.000,00
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	6.844.320.000,00
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	6.844.320.000,00
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	556.200.000,00
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	556.200.000,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	557.792.033,00
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	59.450.000,00
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	59.450.000,00
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	0,00
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	0,00
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	90.532.140,00
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	90.532.140,00
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	0,00
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	0,00
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.111.500,00
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.111.500,00
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	0,00
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	0,00
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	0,00
5.1.01.05.07.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	0,00
5.1.01.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	0,00
5.1.01.05.08.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	0,00
5.1.01.05.09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	0,00
5.1.01.05.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	0,00
5.1.01.05.10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	405.673.853,00
5.1.01.05.10.0001	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor bagi KDH/WKDH	109.507.449,00
5.1.01.05.10.0002	Belanja Insentif Pemungutan bagi KDH/WKDH atas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	104.128.359,00
5.1.01.05.10.0003	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	83.894.752,00
5.1.01.05.10.0005	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Rokok	108.143.293,00
5.1.01.05.12	Belanja Jasa Pengelolaan BMD bagi KDH	1.024.540,00
5.1.01.05.12.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan bagi KDH	412.800,00
5.1.01.05.12.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan bagi KDH	611.740,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	1.451.600.000,00



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	201.600.000,00
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	201.600.000,00
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	1.250.000.000,00
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	1.250.000.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	585.325.766.001,00
5.1.02.01	Belanja Barang	143.150.259.289,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	142.962.417.039,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	12.842.997.124,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	986.206.800,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	1.223.781.826,00
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	3.016.306.750,00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	667.389.190,00
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	1.575.000,00
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	292.045.352,00
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	725.092.200,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	2.193.557.472,00
5.1.02.01.01.0016	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	162.326.016,00
5.1.02.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	0,00
5.1.02.01.01.0020	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	57.744.760,00
5.1.02.01.01.0022	Belanja Suku Cadang-Persediaan dari Belanja Bantuan Sosial	4.520.880,00
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	9.177.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.169.073.855,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.042.542.418,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	6.746.074.283,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	728.060.606,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	205.680.261,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	3.846.064.421,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	2.196.170.769,00
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	656.091.000,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	3.076.645.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	9.636.329.626,00
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	3.254.082.962,00
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	15.806.834,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	29.842.269.756,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	218.085.687,00
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	236.445.750,00
5.1.02.01.01.0050	Belanja Persediaan Dalam Proses-Persediaan Dalam Proses	0,00
5.1.02.01.01.0051	Belanja Persediaan Dalam Proses-Persediaan Dalam Proses Lainnya	517.500,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16.521.996.567,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	23.018.654.420,00
5.1.02.01.01.0055	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	1.824.646.000,00



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	24.600.000,00
5.1.02.01.01.0057	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Sosial	2.700.000,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	6.616.319.954,00
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	782.430.000,00
5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	343.692.500,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	606.164.000,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	169.818.000,00
5.1.02.01.01.0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	281.900.000,00
5.1.02.01.01.0068	Belanja Pakaian Siaga	1.560.000,00
5.1.02.01.01.0069	Belanja Pakaian Teknik	424.320.000,00
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	226.570.000,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	702.420.000,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	1.234.044.500,00
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	127.920.000,00
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	187.842.250,00
5.1.02.01.02.0004	Belanja Komponen-Komponen Rambu-Rambu	30.050.000,00
5.1.02.01.02.0007	Belanja Pipa-Pipa Air Besi Tuang (DCI)	40.931.250,00
5.1.02.01.02.0012	Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	116.406.000,00
5.1.02.01.02.0013	Belanja Pipa-Pipa Lainnya	455.000,00
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	0,00
5.1.02.01.04.0036	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	0,00
5.1.02.01.04.0575	Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Provinsi	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	160.535.501.779,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	128.459.782.357,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	6.773.199.290,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	3.793.986.500,00
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	843.346.356,00
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	106.800.000,00
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	329.600.000,00
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	538.900.000,00
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	400.600.000,00
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	24.000.000,00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	1.159.584.253,00
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	806.297.872,00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	6.455.080.000,00
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	84.520.000,00
5.1.02.02.01.0021	Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air	925.200.000,00
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	970.271.000,00
5.1.02.02.01.0024	Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	3.000.000,00
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	328.900.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	25.318.492.500,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	8.826.317.500,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	2.006.360.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	5.401.657.290,00



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	5.046.343.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	4.176.960.000,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	1.048.384.000,00
5.1.02.02.01.0034	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	421.300.000,00
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	1.177.045.000,00
5.1.02.02.01.0036	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	2.053.340.000,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	578.150.000,00
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	29.200.000,00
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	1.483.592.500,00
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	116.000.000,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	22.022.936.763,00
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	388.800.000,00
5.1.02.02.01.0053	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	261.800.000,00
5.1.02.02.01.0054	Belanja Jasa Jalan/Tol	46.000.000,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	455.100.000,00
5.1.02.02.01.0057	Belanja Jasa Operator Kapal	93.000.000,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	105.784.200,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	134.665.974,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	8.036.764.698,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	7.637.600.320,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	2.596.913.921,00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	1.624.929.200,00
5.1.02.02.01.0065	Belanja Penambahan Daya	5.135.000,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	916.153.220,00
5.1.02.02.01.0069	Belanja Pengolahan Air Limbah	10.235.000,00
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	187.500.000,00
5.1.02.02.01.0076	Belanja Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan	2.700.037.000,00
5.1.02.02.01.0077	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN	10.000.000,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	14.430.666.556,00
5.1.02.02.02.0002	Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI	13.594.364.000,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	9.600.000,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	397.642.156,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	429.060.400,00
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	14.500.000,00
5.1.02.02.03.0017	Belanja Sewa Tanah Lapangan Olahraga	12.000.000,00
5.1.02.02.03.0035	Belanja Sewa Lapangan Lainnya	2.500.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	6.453.444.280,00
5.1.02.02.04.0003	Belanja Sewa Excavator	25.000.000,00
5.1.02.02.04.0010	Belanja Sewa Alat Pengangkat	465.500.000,00
5.1.02.02.04.0022	Belanja Sewa Electric Generating Set	15.000.000,00
5.1.02.02.04.0031	Belanja Sewa Peralatan Selam	60.000.000,00
5.1.02.02.04.0035	Belanja Sewa Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	3.795.586.200,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	372.133.080,00
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	57.500.000,00
5.1.02.02.04.0049	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	44.000.000,00
5.1.02.02.04.0054	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Tak	0,00



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
	Bermotor untuk Penumpang	
5.1.02.02.04.0060	Belanja Sewa Perkakas Konstruksi Logam yang Transportable (Berpindah)	5.000.000,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	199.950.000,00
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	73.675.000,00
5.1.02.02.04.0121	Belanja Sewa Alat Pendingin	0,00
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	52.100.000,00
5.1.02.02.04.0133	Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film	172.000.000,00
5.1.02.02.04.0137	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	240.500.000,00
5.1.02.02.04.0405	Belanja Sewa Personal Computer	11.250.000,00
5.1.02.02.04.0410	Belanja Sewa Peralatan Jaringan	8.400.000,00
5.1.02.02.04.0451	Belanja Sewa Alat Pelindung Lainnya	853.850.000,00
5.1.02.02.04.0509	Belanja Sewa Peralatan Olahraga Lainnya	2.000.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	2.717.882.500,00
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	1.284.210.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	351.375.000,00
5.1.02.02.05.0011	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga	5.000.000,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	1.043.997.500,00
5.1.02.02.05.0050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	33.300.000,00
5.1.02.02.06	Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	33.600.000,00
5.1.02.02.06.0118	Belanja Sewa Instalasi Lain	33.600.000,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	470.500.000,00
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	182.900.000,00
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	287.600.000,00
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	3.367.464.836,00
5.1.02.02.11.0001	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	136.570.000,00
5.1.02.02.11.0002	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	2.860.172.836,00
5.1.02.02.11.0003	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3	370.722.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	4.572.861.250,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	3.821.450.000,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	520.000.000,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	30.000.000,00
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	201.411.250,00
5.1.02.02.15	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	14.800.000,00
5.1.02.02.15.0002	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise	14.800.000,00
5.1.02.02.15.0005	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Software	0,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	22.315.948.809,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	15.139.687.368,00
5.1.02.03.02.0012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	100.000.000,00
5.1.02.03.02.0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	194.469.200,00
5.1.02.03.02.0023	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	0,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	10.125.739.862,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	661.455.000,00
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	98.000.000,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan	883.615.020,00



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
	Bermotor Beroda Dua	
5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	40.480.000,00
5.1.02.03.02.0053	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor-Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Barang	28.000.000,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	1.063.430.400,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	788.985.986,00
5.1.02.03.02.0137	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya	7.000.000,00
5.1.02.03.02.0376	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi Lainnya	175.000.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	683.761.800,00
5.1.02.03.02.0407	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe	99.000.000,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	117.500.100,00
5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	53.750.000,00
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	19.500.000,00
5.1.02.03.02.0451	Belanja Pemeliharaan Alat Keselamatan Kerja-Alat Pelindung-Alat Pelindung Lainnya	0,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	6.435.003.441,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	4.901.897.364,00
5.1.02.03.03.0006	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	199.878.477,00
5.1.02.03.03.0032	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	32.130.000,00
5.1.02.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	1.301.097.600,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	741.258.000,00
5.1.02.03.04.0002	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Provinsi	741.258.000,00
5.1.02.03.04.0005	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Desa	0,00
5.1.02.03.04.0023	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Lainnya	0,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	106.859.931.707,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	106.458.131.545,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	49.748.689.960,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	46.246.003.665,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	9.854.265.340,00
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	609.172.580,00
5.1.02.04.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	401.800.162,00



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.04.02.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri	401.800.162,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	10.410.425.000,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	9.070.425.000,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	1.195.425.000,00
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	350.000.000,00
5.1.02.05.01.0003	Belanja Beasiswa	7.525.000.000,00
5.1.02.05.01.0004	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	0,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.340.000.000,00
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	700.000.000,00
5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	640.000.000,00
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	83.427.420.000,00
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	83.427.420.000,00
5.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	83.427.420.000,00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	58.626.279.417,00
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	58.626.279.417,00
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	58.626.279.417,00
5.1.03	Belanja Bunga	13.092.981.961,00
5.1.03.01	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat	13.092.981.961,00
5.1.03.01.06	Belanja Bunga Utang Pinjaman Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Panjang	13.092.981.961,00
5.1.03.01.06.0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman Sumber Lainnya sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-Jangka Panjang	13.092.981.961,00
5.1.05	Belanja Hibah	110.788.808.800,00
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	70.800.000.000,00
5.1.05.01.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	70.800.000.000,00
5.1.05.01.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	70.800.000.000,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	23.070.000.000,00
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	2.600.000.000,00
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	2.600.000.000,00
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	17.170.000.000,00
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	17.170.000.000,00
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	800.000.000,00
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	800.000.000,00
5.1.05.05.06	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	2.500.000.000,00
5.1.05.05.06.0003	Belanja Hibah Jasa kepada Organisasi	2.500.000.000,00



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
	Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	15.807.790.000,00
5.1.05.06.03	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	13.060.740.000,00
5.1.05.06.03.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikmen Swasta	13.060.740.000,00
5.1.05.06.04	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta	2.747.050.000,00
5.1.05.06.04.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdiksus Swasta	2.747.050.000,00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.111.018.800,00
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.111.018.800,00
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.111.018.800,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	662.500.000,00
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	122.500.000,00
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	122.500.000,00
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	122.500.000,00
5.1.06.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	410.000.000,00
5.1.06.03.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	410.000.000,00
5.1.06.03.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	410.000.000,00
5.1.06.04	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	130.000.000,00
5.1.06.04.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	130.000.000,00
5.1.06.04.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)	130.000.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	835.246.979,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	835.246.979,00
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	835.246.979,00
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	835.246.979,00
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	835.246.979,00
5.4	BELANJA TRANSFER	200.254.965.747,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	200.254.965.747,00
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	200.254.965.747,00
5.4.01.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten	200.254.965.747,00
5.4.01.01.01.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten	200.254.965.747,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	0,00
5.4.02.03	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	0,00
5.4.02.03.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota	0,00
	Jumlah Belanja	1.645.550.162.534,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	99.488.146.356,00



KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	99.488.146.356,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	99.488.146.356,00
6.2.03.04	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	99.488.146.356,00
6.2.03.04.03	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang	99.488.146.356,00
6.2.03.04.03.0001	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang	99.488.146.356,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	99.488.146.356,00

Pj. GUBERNUR SULAWESI BARAT,

ttd

BAHTIAR BAHARUDDIN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Plt. Kepala Biro Hukum,



AFRISAL, SH, MH
Pangkat Penata Tk.I/III.d
NIP. 19811214 201101 1 006